

Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

Lenny Mariana¹, Pandoyo²

^{1,2} Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

e-mail : ¹lenny.mariana@gmail.com, ²p.pandoyo@gmail.com

*Corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

SIPD;

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Edward III;

Implementasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci yang terkait dengan penerapan aplikasi SIPD, serta melalui analisis dokumen dan observasi langsung. Analisis penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menentukan keberhasilan suatu implementasi dengan mempertimbangkan factor komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), sikap (*disposition*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Pengembangan SIPD merupakan perwujudan dari amanat Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah untuk digunakan secara efektif dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di BPKAD Kota Bekasi masih memiliki beberapa hambatan yang perlu diatasi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hambatan dalam penerapan SIPD yang faktor komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terampil karena Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pengembang aplikasi serta masalah teknis dalam seperti aplikasi yang sulit untuk di akses karena permasalahan jaringan, infrastruktur, serta fitur menu pada aplikasi yang belum lengkap juga menjadi salah satu kendala. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam penerapan Sistem informasi di pemerintahan daerah.

This is an open access article under the [BY-NC-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Sulitnya Pemerintah Pusat dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan Daerah secara nasional karena belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam memenuhi kebutuhan akuntabilitas dan transparansi serta fakta bahwa database pemerintah daerah masih bersifat lokal dan belum terkoneksi dengan pemerintah pusat menjadi alasan Kementerian Dalam Negeri melakukan pengembangan program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pengembangan Aplikasi SIPD ini merupakan perwujudan kebijakan Kementerian Dalam Negeri menuju satu data satu sistem dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang memiliki tujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah untuk digunakan secara efektif dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja pemerintah. Dengan adanya

satu sistem yang terhubung diharapkan memudahkan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat sehingga informasi menjadi lebih adaptif, reponsif, dinamis, inovatif dan akuntabel yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik melalui situs jaringan resmi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah yang dikelola melalui Aplikasi SIPD. Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pelaporan anggaran, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Menurut Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021), Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat telah menggunakan aplikasi SIPD, akan tetapi pada implementasinya ditemukan kendala antara lain tidak adanya kejelasan SOP dan tupoksi sehingga menyebabkan kebingungan atas pembagian tugas pada saat pelaksanaan dan banyak pegawai yang mengalami kesulitan untuk memahami penggunaan aplikasi SIPD. Menurut Penelitian Vitriana, N., & Ahyaruddin, M. (2022) yang dilakukan pada penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru masih sampai tahap perencanaan dan penganggaran belum sampai tahap penatausahaan dan pelaporan hingga pertanggungjawaban, banyak pegawai yang masih kurang paham dalam menggunakan aplikasi, dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan data di SIPD, seringkali para pegawai melewatkan salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, dan sistem penggajian yang terhambat, SIPD sendiri masih mengalami *error* ketika banyak yang mengakses aplikasi ini khususnya pada jam kerja sehingga menghambat dalam proses penyusunan anggaran kas, dan pembuatan surat-surat penting.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan Fungsional AKPD pada BPKAD Kota Bekasi pada bulan Mei Tahun 2024, menyatakan bahwa Penerapan aplikasi SIPD pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Bekasi mulai diberlakukan pada Tahun Anggaran 2021 dan dimana penerapannya terkesan dipaksakan karena saat itu aplikasi belum sepenuhnya mengakomodir sistem pengelolaan keuangan daerah dan sangat berisiko apabila digunakan karena berpengaruh proses pengelolaan keuangan daerah. Selain itu terdapat berbagai kendala yang penulis temukan pada saat observasi dan wawancara pendahuluan tersebut bahwa terdapat beberapa masalah terkait penerapan aplikasi SIPD di BPKAD Kota Bekasi, karena pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, pelatihan aplikasi SIPD kurang optimal karena hanya dapat dilakukan melalui daring, fitur menu pada aplikasi yang belum lengkap yang masih terbatas sampai tahap perencanaan dan penganggaran serta sulitnya akses aplikasi dikarenakan lambannya sistem sehingga mengakibatkan ketidak efisienan waktu pada proses penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada BPKAD Kota Bekasi. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di BPKAD Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi SIPD dengan mengukur keberhasilan kebijakan berdasarkan teori Edward III, mencakup komunikasi, sumber daya, sikap, struktur birokrasi, serta faktor penghambat dan upaya mengatasinya. Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, melibatkan pejabat yang berhubungan langsung dengan implementasi SIPD. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data mencakup uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Sebagai pendekatan yang komprehensif, metode penelitian ini memberikan gambaran rinci dan mendalam tentang implementasi SIPD, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kelebihan, kendala, serta upaya yang dilakukan dalam penerapan sistem ini di BPKAD Kota Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Bekasi.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Untuk melihat sejauh mana Implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bekasi, peneliti menggunakan pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan menggunakan teori Edward III dengan kriteria yaitu Komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*Resources*), Sikap (*Disposition*); Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*), serta faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

a. Komunikasi (*Communication*)

Teori menggunakan teori Edward III menyatakan bahwa implementasi dapat efektif, siapapun yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sebuah keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten. kebijakan, menurut Edward III dalam komunikasi terdapat 3 (tiga) aspek yang penting, yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsistensi (Firmansyah, 2023). Transmisi informasi merupakan langkah pertama dan langkah penting dalam memastikan implementasi kebijakan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kemendagri sebagai pembuat dan pengembang SIPD telah menerapkan proses transmisi informasi, sejalan dengan pernyataan seluruh informan yang menyatakan telah mendapatkan transmisi informasi melalui media mulai dari *digital* seperti *Youtube* dan grup pesan seperti *telegram* dan *whatsapp*, sosialisasi serta wadah *sharing* dan layanan pengaduan, akan tetapi Berdasarkan pernyataan para informan media penyaluran informasi melalui wadah *sharing* dan layanan pengaduan belum cukup efektif dalam Implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bekasi. Media penyaluran komunikasi pada Implementasi SIPD pada BPKAD Kota Bekasi dirasakan masih kurang memadai dan efektif dalam memberikan kejelasan pemahaman atas penggunaan aplikasi SIPD sebagaimana pendapat sebagian besar informan. Konsistensi Implementasi aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Bekasi belum dirasakan secara merata karena sebagian besar informan merasakan konsistensinya akan tetapi informan lain ada yang belum merasakan konsistensinya.

b. Sumber daya (*Resources*)

Menurut Edward III. Implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya yang penting untuk mengimplementasikan meliputi (Firmansyah, 2023):

1. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan merasa bahwa SDM di BPKAD Kota Bekasi sudah cukup dan memadai dalam penerapan aplikasi SIPD, ada juga beberapa yang merasa kompetensi masih perlu ditingkatkan. Dari wawancara yang dilakukan dengan semua informan menyatakan belum pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan penggunaan aplikasi SIPD. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang penggunaan aplikasi SIPD. Pandemi COVID-19 juga memperparah situasi, karena peluncuran SIPD bertepatan dengan masa di mana pendidikan dan pelatihan secara offline sangat terbatas. Hal tersebut menyebabkan adaptasi terhadap fitur dan tampilan baru SIPD menjadi lebih sulit. Kesulitan ini diperparah oleh kurangnya pengarahan teknis secara menyeluruh yang membuat pengguna merasa terhambat dalam menggunakan SIPD;
2. Fasilitas merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan operasional di BPKAD Kota Bekasi, terutama dalam penerapan aplikasi SIPD. Hasil wawancara dengan para informan memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai kondisi fasilitas yang ada, mencakup infrastruktur fisik, teknologi, serta sarana pendukung lainnya. Infrastruktur dan teknologi memegang peranan penting dalam memastikan aplikasi SIPD dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Semua informan menyatakan bahwa fasilitas infrastruktur dan teknologi yang dimiliki BPKAD tersedia sudah memadai untuk mendukung penerapan aplikasi SIPD. Yang menjadi kendala adalah Infrastruktur dimiliki Kemendagri selaku

pengembang aplikasi, Beberapa informan menyoroti adanya masalah yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan aplikasi SIPD .

c. Sikap (*Disposition*)

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan bersepakat bahwa Pemerintah Kota Bekasi khusus BPKAD Kota Bekasi sangat mendukung penerapan aplikasi SIPD pada proses pengelolaan Keuangan Daerah. Disampaikan Informan pula, faktor utama yang mendukung penerapan SIPD adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Peraturan ini memaksa pemerintah daerah untuk menggunakan SIPD meskipun masih terdapat banyak kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kita dapat melihat perbedaan pandangan antara beberapa informan terkait dengan kejelasan dan keberadaan SOP dalam penerapan Aplikasi SIPD di BPKAD Kota Bekasi. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya potensi perbedaan interpretasi atau pemahaman terhadap SOP yang ada, atau mungkin memang terdapat kesenjangan dalam implementasi SOP antara berbagai unit atau departemen di BPKAD Kota Bekasi. Ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam proses implementasi SOP untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan kejelasannya bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh para informan, terlihat bahwa pembagian tugas di BPKAD Kota Bekasi dalam konteks penerapan Aplikasi SIPD sudah cukup baik dan terstruktur. Para informan menyoroti berbagai aspek terkait dengan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi tersebut.

2. Faktor Penghambat Implementasi Aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Bekasi

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan pendapat antara informan dari BPKAD Kota Bekasi dan Kementerian Dalam Negeri terkait hambatan dalam penerapan Aplikasi SIPD. Informan dari Kementerian Dalam Negeri, lebih menyoroti masalah persepsi pengguna dan perilaku pengelolaan keuangan yang belum berubah. Ia menekankan bahwa perubahan perilaku dan persepsi pengguna adalah kunci selain perbaikan teknis dalam mengatasi hambatan tersebut. Di sisi lain, delapan informan dari BPKAD Kota Bekasi lebih fokus pada masalah teknis. Mereka menyebutkan berbagai kendala seperti infrastruktur, kesiapan aplikasi, jaringan, performa, keterbatasan menu, akses, dan koordinasi. Masalah akses dan jaringan yang kurang baik serta kesiapan aplikasi yang belum optimal dalam menyajikan tahapan pengelolaan keuangan daerah menjadi sorotan utama mereka.

Selain itu, informan dari BPKAD Kota Bekasi juga mengidentifikasi kekurangan SDM yang mampu menggunakan Aplikasi SIPD secara efektif. Mereka menekankan perlunya peningkatan pelatihan dan kesiapan SDM dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Kurangnya komunikasi dan SOP juga disebut sebagai hambatan dalam penerapan Aplikasi SIPD. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi SIPD menghadapi tantangan yang kompleks, mencakup aspek teknis dan perubahan perilaku serta persepsi pengguna. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan perbaikan teknis, pelatihan SDM, perubahan perilaku, dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait. Upaya bersama dalam mengatasi tantangan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan Aplikasi SIPD.

3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Bekasi

Untuk menjawab tantangan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kota Bekasi, berbagai langkah penting telah diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi pendukung untuk mengelola keuangan, terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang masih dalam pengembangan di SIPD. Aplikasi pendamping ini, yang dikenal sebagai SIPD Kota Bekasi, menjadi alternatif saat SIPD belum optimal dalam mengakomodir semua proses pengelolaan keuangan daerah. Langkah serupa juga dilakukan oleh BPKAD Kota Medan, seperti yang diteliti oleh Muhammad Irfan Nasution dan

Nurwani, yang menyarankan penggunaan aplikasi pendamping untuk memperlancar proses pengelolaan keuangan daerah.

Upaya lainnya termasuk pengiriman surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi SIPD, permintaan pemindahan database ke daerah, serta saran-saran peningkatan aplikasi. Komunikasi langsung dengan tim di Kemendagri juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan solusi teknis dari para ahli. Langkah ini memungkinkan pertukaran informasi yang efektif dan percepatan respon terhadap masalah yang dihadapi. BPKAD Kota Bekasi juga melakukan perekaman ulang setiap aktivitas yang diinput di SIPD Kota Bekasi serta pengendalian ketat terhadap data tersebut. Selain itu, sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis terkait penggunaan SIPD diadakan untuk mengatasi hambatan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi Aplikasi SIPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, telah melakukan komunikasi melalui berbagai media seperti digital dan sosialisasi. Meskipun sudah ada upaya untuk menyampaikan informasi, wadah *sharing* dan layanan pengaduan dari Kementerian Dalam Negeri masih perlu diperbaiki. Selain itu meskipun media penyaluran informasi telah ada, kejelasan pemahaman atas penggunaan aplikasi SIPD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sosialisasi dan pelatihan teknis yang lebih aktif. Pada Aspek sumber Daya (*Resources*), SDM di BPKAD Kota Bekasi dianggap cukup, tetapi masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi terkait aplikasi SIPD melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif, serta Infrastruktur dan teknologi di BPKAD Kota Bekasi sudah memadai, tetapi masih ada beberapa kendala terkait akses masuk aplikasi yang kurang baik dikarenakan *Server* Kemendagri masih belum cukup kuat mengakomodir penggunaan aplikasi secara nasional, pembaruan perangkat keras, dan pemeliharaan *server* yang perlu diperhatikan. Pada Aspek Sikap (*Dispositition*), Para informan menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Bekasi khususnya BPKAD kota Bekasi terhadap penerapan aplikasi SIPD sebagai respons terhadap peraturan yang mengatur penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Aspek yang terakhir adalah Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*), Terdapat perbedaan pendapat terkait kejelasan dan keberadaan SOP dalam penerapan Aplikasi SIPD di BPKAD Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam proses implementasi SOP, selain itu Pembagian tugas dan tanggung jawab di BPKAD Kota Bekasi dinilai sudah cukup baik dan terstruktur, tetapi terdapat beberapa catatan terkait potensi fragmentasi yang perlu diperhatikan.
2. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) terbagi menjadi dua aspek utama: teknis dan non-teknis. Aspek teknis menjadi fokus utama dari informan BPKAD Kota Bekasi, yang menyoroti masalah infrastruktur, kesiapan aplikasi, jaringan, performa, keterbatasan menu, akses, dan koordinasi. Permasalahan ini mencakup berbagai aspek teknis yang perlu diperbaiki agar aplikasi dapat berjalan secara efektif. Sementara itu, informan dari Kementerian Dalam Negeri menekankan aspek non-teknis, khususnya perubahan perilaku dan persepsi pengguna. Mereka mengidentifikasi bahwa perubahan perilaku dan persepsi pengguna merupakan aspek kunci yang perlu diperhatikan selain perbaikan teknis dalam mengatasi hambatan-hambatan ini.
3. Upaya utama yang dilakukan BPKAD kota Bekasi dalam mengatasi hambatan penerapan aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Bekasi, antara lain BPKAD Kota Bekasi telah menggunakan aplikasi pendukung untuk memproses pengelolaan keuangan, terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang masih dalam tahap pengembangan di SIPD. Hal ini menunjukkan upaya untuk tetap berjalan secara efektif meskipun SIPD belum dapat mengakomodir semua proses dengan optimal. Langkah formal telah diambil dengan mengirimkan surat resmi ke Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan

Aplikasi SIPD. Surat ini berisi rincian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi, permintaan bantuan atau perbaikan, serta saran-saran untuk peningkatan aplikasi. BPKAD Kota Bekasi melakukan komunikasi langsung dengan tim di Kemendagri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif dan respon yang lebih cepat terhadap permasalahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk menerapkan Aplikasi SIPD di BPKAD Kota Bekasi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan, terutama terkait komunikasi, peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM, serta pengelolaan infrastruktur dan teknologi yang lebih efektif. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam proses implementasi Aplikasi SIPD sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan efektivitasnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abimata, F. (2023). *Evaluasi dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang*. Indonesia Emas Group.
- Baldric, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Djarmiko, G. H. (2023). *New Public Service: Perseptif Pelayanan Administrasi Publik di Indonesia*. CV. Adanu Abimata
- Djarmiko, G. H. (2023). *Transformasi Kebijakan Administrasi Publik Menuju Era Society 5.0*. CV Adanu
- Eriyanti, F. (2023). *Sosiologi Administrasi Negara: Suatu Analisis Makro dan Mikro*. Raja Grafindo Persada.
- Gainau, M. B. (2021). *Pengantar Metode Penelitian* (C. Subagya, Ed.; Edisi Elektronik). PT. Kanisius.
- Kusdi. (2019). *Teori Organisasi dan Administrasi* (R. Widyaningrum, Ed.). Salemba Humanika.
- Lasiyono, U., & Alam, W. Y. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Mega Press Nusantara.
- Latif, A. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. PT Bumi Aksara.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit UPP STIM YPKN.
- Mahmud M. (2024). *Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Nadjib, A. (2023). *Keuangan Negara dan Daerah* (N. Duaniawati, Ed.). CV. Adanu Abimata.
- Nugraha, J. T., Achmad, T., Warsono, H., & Yuningsih, T. (2023). *E-Government dalam Perspektif Pengguna: Konsep, Teori, dan Perkembangannya*. Stiletto Book.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo.
- Nur, M. (2023). *Organisasi dan Manajemen*. Deepublish Digital.
- Nurfin, N., Wahdi, R., Suyanti, T., Surtawijaya, & Santoso. (2023). *Implementasi Teori & Kebijakan Publik Terapan* (Vol. 1). CV Mega Press Nusantara.
- Noor, M. (2023). *Dinamika Ilmu Administrasi Publik dalam Merawat Proses Demokratisasi*. Deepublish Digital.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Rafie A, Merta M, & Junaidi. (2024). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. CV Mega Press.
- Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). *Metode Penelitian* (R. Gunadi, Ed.). Deepublish.

- Sophan, M. K., & Darmawan, A. K. (2023). *E-Government*. Media Nusa creative.
- Supardan, H. (2020). *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*. Media Nusa Creative.
- Susniwati, & Kushendar, D. H. (2023). *Administrasi Digital*. CV Adanu Abimata.
- Yusuf, M., Ariefiati, A., Sophan, M. K., & Darmawan, A. K. (2023). *E-Government* (1 ed.). Media Nusa Creative

JURNAL

- Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 11(1), 146–161. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953>
- Ibrahim, A., Arief, A., & Do Abdullah, S. (2020). Keamanan Untuk Penerapan Layanan Publik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe): Sebuah Kajian Pustaka Sistematis. Dalam *IJIS Indonesian Journal on Information System*.
- Karubaba, C. F., Manokwari, A. K., Papua, P., Program, B., Administrasi, S., & Daerah, P. (2020). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat*.
- Nasution, M. I., & M. Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nitasya, D., Handajani, L., Astuti, W., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Apakah Efektif Dalam Mendukung Pelaporan Keuangan OPD. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(1), 243–255. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i1.2064>
- Pareda, M., Sondakh, Jullie. J., & Ilat, V. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8, 268–279.
- Ramli, M. F. (2022). *Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Pelayanan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Simarmata, B. T., Abbas, I., Maulidar, Sholihah, N. A., Surni, Awaru, T. O., Djamjuri, D. S., Khoiruddin, Jemakmun, Santoso, R., & Tasrif, M. J. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Selat Media Partners.
- Vitriana, N., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). *DIGIBIS: Digital Business Journal*, 1(1). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis>
- Welly, Arifin, M. S., Ghozali, R., & Sabrina, N. (2021). Analisis Tranparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website se-Jawa Bali. *Balance: Jurnal Akutansi dan Bisnis*, 6, 157–167.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.